

**PENGARUH PRAKTIK TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK TERHADAP
PENGUNGKAPAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN**

**(Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa
Efek Indonesia Tahun 2010-2011)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

**PRADESTA ARININGTIKA
C2C009185**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
2013**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Pradesta Ariningtika

Nomor Induk Mahasiswa : C2C009185

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/AKUNTANSI

Judul Skripsi : **PENGARUH PRAKTIK TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK TERHADAP PENGUNGKAPAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2011)**

Dosen Pembimbing : Dr. Endang Kiswara, S.E., M.Si., Akt.

Semarang, 22 Januari 2013

Dosen Pembimbing,

(Dr. Endang Kiswara, S.E., M.Si., Akt.)

NIP.19690214 199412 2001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Pradesta Ariningtika
Nomor Induk Mahasiswa : C2C009185
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/AKUNTANSI
Judul Skripsi : **PENGARUH PRAKTIK TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK
TERHADAP PENGUNGKAPAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN
(Studi Empiris Pada Perusahaan
Pertambangan yang Terdaftar di Bursa
Efek Indonesia Tahun 2010-2011)**
Dosen Pembimbing : Dr. Endang Kiswara, S.E., M.Si., Akt.

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal : 26 Februari 2013

Tim Penguji:

1. Dr. Endang Kiswara, M.Si., Akt (.....)
2. Agung Juliarto, SE., Msi., Akt, Ph.D (.....)
3. Puji Harto, S.E., M.Si., Akt., Ph.D (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda-tangan di bawah ini saya, Pradesta Ariningtika, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **Pengaruh Praktik Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Terhadap Pengungkapan Lingkungan Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2011)**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau symbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau penulisan dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 22 Januari 2013

Yang membuat pernyataan,

(Pradesta Ariningtika)

NIM. C2C009185

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Bahwa kita bisa merealisasikan, mencapai dan mewujudkan apa-apa yang kita inginkan (impikan) apabila kita bisa berpikir secara positif dan yakin bahwa keinginan (mimpi) kita tersebut pasti akan kita capai (dapatkan)” – Law of Attraction

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri..” (QS. Al-Isra’: 7)

Kupersembahkan :
Teruntuk ibu dan ayah yang telah membesarkan dan mendidik
Untuk kakak yang selalu menjaga dengan penuh kasih sayang
Untuk keluarga besar yang selalu mendukungku
Untuk para sahabatku yang selalu menghibur dengan penuh canda dan tawa
Dan
Untuk seluruh teman-teman yang telah menjadi
keluarga kedua bagiku

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of the practice of good corporate governance on corporate environmental disclosure. The practice of good corporate governance is proxied by the proportion of the board of commissioners, the number of meetings the board, audit committee size and the number of audit committee meetings. This study also includes profitability, company size and leverage as control variables.

The population of this research is the mining industry companies are listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) 2010-2011. Total observations is 38 mining companies. Sampling technique in this study is purposive sampling method. The data analysis techniques use multiple linear regression method.

The results showed that the number of meetings of the board of commissioners and the size of the audit committee significantly influence corporate environmental disclosure. Meanwhile, the proportion of independent commissioners, the number of audit committee meetings, profitability, company size and leverage did not significantly influence towards corporate environmental disclosure

Keywords: *Good corporate governance practices, corporate environmental disclosure, profitability, leverage*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh praktik tata kelola perusahaan yang baik terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan. Praktik tata kelola perusahaan yang baik diproksikan oleh proporsi dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, ukuran komite audit dan jumlah rapat komite audit. Penelitian ini juga menyertakan profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *leverage* sebagai variabel kontrol.

Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan industri sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2011. Total pengamatan adalah 38 perusahaan pertambangan. Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik analisis data dilakukan dengan pengujian hipotesis menggunakan metode regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah rapat dewan komisaris dan ukuran komite audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan. Sementara itu, proporsi komisaris independen, jumlah pertemuan komite audit, profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan lingkungan perusahaan.

Kata kunci: Praktik *Good Corporate Governance*, *Corporate Environmental Disclosure*, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, *leverage*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidaya-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **PENGARUH PRAKTIK TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK TERHADAP PENGUNGKAPAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2011)**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, bimbingan, bantuan dan doa dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak dan Ibu untuk kasih sayang, nasihat, semangat dan doa yang tak pernah putus serta telah mengorbankan apapun demi tercapainya cita-cita anak-anaknya.
2. Ibu Dr. Endang Kiswara, S.E., M.Si., Akt., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan saran, kritik, nasehat, dukungan dan motivasi yang membangun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Ibu Andri Prastiwi, S.E., M.Si., Akt., selaku Dosen Wali.

4. Bapak Ibu dosen dan seluruh staf pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
5. Kakak tersayang Pradesia Ariningtias atas segala bantuannya baik moril maupun materiil, semangat, doa dan dukungannya.
6. Aldo Gunawan, terima kasih atas waktu, perhatian, semangat dan kasih sayangnya. Terima kasih telah mengajarkan arti kehidupan yang sesungguhnya.
7. Big thanks to my best Nanda Putri K., Endah Yuskurnia, Ilham Perdana Putra, Yuanisa Meistha, tante Yuni, Sarah, Mas Daniel, Herlin, Nurul Irfani, Renny Terima kasih untuk kebersamaan, persahabatan, inspirasi, dan motivasi selama ini.
8. My best partner Martantya Maudy Rahmanti atas dukungan semangat dan waktunya selama ini.
9. Teman seperjuangan Haris, Yoshua, Prita Saras, Denny, Ocir, Intan, Siska, terimakasih atas waktunya dan kebersamaannya.
10. Para sahabatku Alfiyani, Pritta Amina, Kurnia Putri, Riske Meitha, Ardina Nuresa, Hanny Larasati terima kasih untuk kebersamaan dan memberikan banyak pengalaman.
11. Seluruh teman-teman Akuntansi Reguler II angkatan 2009 kelas A. Terima kasih untuk kekeluargaan, kebersamaan, dan kekompakan selama di bangku kuliah.
12. Tim KKN II desa Simpar Kab Batang 2012/2013.

13. Semua pihak yang telah sangat membantu namun tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk sekecil apapun doa yang kalian berikan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	III
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Teori Agensi (<i>Agency Theory</i>)	10
2.1.2 Teori Legitimasi (<i>legitimacy Theory</i>)	12
2.1.3 <i>Corporate Social Responsibility</i>	14
2.1.4 <i>Corporate Environmental Disclosure</i>	16
2.1.5 <i>Good Corporate Governance</i>	18
2.1.6.1 Dewan Komisaris	21
2.1.6.2 Komite Audit	25
2.2. Penelitian Terdahulu	28

2.3.	Kerangka Pemikiran	31
2.4.	Pengembangan Hipotesis	32
2.4.1	Proporsi Dewan Komisaris terhadap <i>Corporate Environmental Disclosure</i>	32
2.4.2	Jumlah Rapat Dewan Komisaris terhadap <i>Corporate Environmental Disclosure</i>	33
2.4.3	Ukuran Komite Audit terhadap <i>Corporate Environmental Disclosure</i>	35
2.4.4	Jumlah Rapat Komite Audit terhadap <i>Corporate Environmental Disclosure</i>	36
BAB III METODE PENELITIAN		37
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	37
3.1.1	Variabel Terikat (dependen)	38
3.1.2	Variabel bebas (independen)	40
3.1.2.1	Proporsi Dewan Komisaris Independen	40
3.1.2.2	Jumlah Rapat Dewan Komisaris	40
3.1.2.3	Ukuran Komite Audit	41
3.1.2.4	Jumlah Rapat Komite Audit	41
3.1.3	Variabel Kontrol	41
3.1.3.1	Ukuran Perusahaan (Size)	42
3.1.3.2	Profitabilitas	42
3.1.3.3	Leverage	42
3.2	Populasi dan Sampel Penelitian	43
3.3	Jenis dan Sumber Data	43
3.4	Metode Pengumpulan Data	44
3.5	Metode Analisis Data	44
3.5.1	Analisis Statistik Deskriptif	44
3.5.2	Uji Asumsi Klasik	44
3.5.2.1	Uji Normalitas	44
3.5.2.2	Uji Multikolinearitas	45
3.5.2.3	Uji Heteroskedastisitas	45

3.5.2.4 Uji Autokorelasi	46
3.5.3 Pengujian Hipotesis	46
3.5.3.1 Koefisien Determinasi (R^2)	47
3.5.3.2 Uji Pengaruh Simultan (Uji F)	48
3.5.3.3 Uji Parsial (Uji t)	48
BAB IV PEMBAHASAN	49
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	50
4.2 Analisis Data	50
4.2.1 Statistik deskriptif	50
4.2.2 Uji Asumsi Klasik	52
4.2.2.1 Uji Normalitas	53
4.2.2.2 Uji Multikolinieritas	53
4.2.2.3 Uji Autokorelasi	55
4.2.2.4 Uji Heteroskedastisitas	56
4.2.3 Persamaan Regresi	57
4.2.4 Hasil Pengujian Hipotesis	58
4.2.2.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	58
4.2.2.2 Uji Statistik F	59
4.2.2.3 Uji statistik T	59
4.3 Pembahasan	63
4.3.1 Proporsi dewan komisaris terhadap <i>Corporate environmental disclosure</i>	63
4.3.2 Jumlah rapat dewan komisaris terhadap <i>Corporate environmental disclosure</i>	64
4.3.3 Ukuran komite audit terhadap <i>Corporate environmental Disclosure</i>	65
4.3.4 Jumlah rapat komite audit terhadap <i>Corporate environmental disclosure</i>	66
4.3.5 Variabel kontrol terhadap <i>Corporate environmental Disclosure</i>	67
BAB V PENUTUP.....	70

5.1 Kesimpulan	70
5.2 Implikasi Penelitian	70
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	71
5.4 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	77

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu	30
Tabel 3.1 Definisi Operasional penelitian	38
Tabel 4.1 Ringkasan Populasi dan Sampel Penelitian	49
Tabel 4.2 Stastistik Deskriptif	50
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas	54
Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi	55
Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas-Uji White	56
Tabel 4.6 Model Persamaan Regresi	57
Tabel 4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi	58
Tabel 4.8 Hasil Uji Statistik f (F-test)	59
Tabel 4.9 Hasil Uji Statistik t (T-test)	60

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis	32
Gambar 4.1 Grafik Uji Normalitas	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A : Hasil output Eviews Statistik Deskriptif

Lampiran B : Hasil Pengujian Regresi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perhatian sosial cenderung diakui sebagai suatu respon perusahaan yang signifikan untuk berkomunikasi antara perusahaan dan masyarakat berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan keberlanjutan (Sun, Aly Salama, Hussainey Khaled dan habbash, 2010). Saat ini keberhasilan suatu perusahaan tidak hanya dilihat dari tingkat laba yang didapatkan oleh perusahaan tersebut, namun juga dari tanggung jawab atas aktivitas yang dilakukan perusahaan baik dalam bidang sosial, kesehatan maupun lingkungan.

Pentingnya aktivitas dan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) juga mendapatkan perhatian dari pemerintah, hal tersebut dapat dilihat dari Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan tentang pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (pertanggungjawaban sosial perusahaan) bagi Perseroan terbatas. UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 66 dan 74, pada pasal 66 ayat 2 bagian c tertulis bahwa selain laporan keuangan, dalam laporan tahunan perusahaan juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Dan dalam pasal 74 menyatakan bahwa setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Di Indonesia masalah pencemaran lingkungan masih banyak terjadi seperti kasus PT Nusa Halmahera Minerals Ltd Perusahaan tambang yang melakukan aktivitas produksi emas ini berlokasi di Pulau Halmahera. Aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan menghasilkan lubang bekas pertambangan seperti di lubang tambang (pit) Gosowong, dibiarkan begitu saja, serta longsor yang dapat menimbulkan air asam tambang dan berpotensi mencemari badan sungai Tobobo. Limbah PT NHM juga mencemari teluk KAO. Yang mengakibatkan ikan teri dan udang kecil mati. Serta kasus yang terjadi pada PT Freeport Indonesia yang terletak di Papua. Pencemaran yang terjadi di Freeport di antaranya pencemaran tanah dan air sehingga menimbulkan kerugian terutama bagi kelangsungan ekologi dan masyarakat sekitar. (Global Future Institute, 2009)

Pencemaran lingkungan akibat dari aktivitas yang dilakukan perusahaan, menimbulkan tekanan dari berbagai pihak khususnya masyarakat terhadap perusahaan agar perusahaan memberikan informasi yang transparan mengenai aktivitas lingkungannya didalam laporan tahunan perusahaan (Anggraini, 2006). Sun, dkk., (2010) menyatakan bahwa pengungkapan sukarela dalam *annual report* seperti pengungkapan lingkungan perusahaan atau yang sering disebut dengan *corporate environmental disclosure* dipandang perlu untuk menunjukkan kepada *stakeholders* akan kesadaran perusahaan dari kepentingan yang lebih luas dan akuntabilitas dengan cara berperilaku tanggung jawab sosial. Semakin banyaknya bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan perusahaan terhadap lingkungannya, maka *image* perusahaan menurut pandangan masyarakat menjadi meningkat atau citra perusahaan menjadi baik.

Tata kelola perusahaan yang baik atau sering disebut dengan *Good corporate governance* berperan penting dalam keberhasilan perusahaan. Dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik diharapkan mampu melakukan pengawasan dan pengendalian sehingga menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Dewan komisaris yang independen secara umum mempunyai pengawasan yang lebih baik terhadap manajemen, sehingga mempengaruhi kemungkinan kecurangan dalam menyajikan laporan keuangan yang dilakukan oleh manajer, artinya semakin kompeten dewan komisaris maka semakin mengurangi kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan (Chtourou,dkk.,2001). Komite audit memegang peranan yang cukup penting dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) karena merupakan bagian dari dewan komisaris dalam mengawasi jalannya perusahaan. Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional dan independen kepada dewan komisaris mengenai laporan atau hal-hal lain yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris, serta untuk mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris (Effendi, 2009). Dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dalam suatu perusahaan diharapkan dapat mengurangi asimetri informasi.

Asimetri informasi antara manajemen (*agent*) dan pemilik (*principal*) dapat memberikan kesempatan kepada agent untuk melakukan tindakan oportunistik seperti manajemen laba (*earnings management*) mengenai kinerja ekonomi perusahaan sehingga dapat merugikan pemilik (*principal*). Teori agensi mampu

menjelaskan potensi konflik kepentingan diantara pihak yang berkepentingan dalam perusahaan tersebut (Jensen dan Meckling, 1976). Sebagai *agent*, manajer bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*), namun demikian manajer juga menginginkan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Sehingga pengungkapan lingkungan perusahaan digunakan sebagai salah satu cara untuk mengalihkan perhatian pemegang saham dari pemantauan kegiatan manajemen laba (Sun, dkk. 2010). Di dalam hubungan keagenan tersebut, muncul yang dinamakan *agency cost*.

Beberapa penelitian empiris sebelumnya banyak berfokus pada pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR) dengan tata kelola perusahaan yang baik. Namun dalam penelitian ini lebih berfokus pada pengkajian pengaruh *corporate governance* terhadap CSR yang diprosikan dengan pengungkapan lingkungan perusahaan. Said, dkk (2009) dan Prior, D., Surroca, J. and Tribo, J. (2008) merupakan artikel yang mengeksplorasi hubungan antara CSR dan manajemen laba. Penelitian yang dilakukan Prior, dkk. (2008) menunjukkan hasil bahwa ada pengaruh positif dari praktik manajemen laba (*earnings management*) terhadap CSR. Sedangkan Said, Zainuddin dan Haron. (2009) menemukan adanya hubungan kepemilikan pemerintah, dan komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap luas *Corporate Social Responsibility*.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Sun, Salama, Hussainey dan Habbash (2010). Penelitian terdahulu dilakukan oleh Sun, dkk., (2010) dengan *setting* di Inggris pada perusahaan yang terdaftar di *Financial*

Times and the London Stock Exchange (FTSE) antara tahun 2006-2007 yang meneliti hubungan antara pengungkapan lingkungan perusahaan dan manajemen laba dan dampak mekanisme tata kelola perusahaan yang baik terhadap asosiasi tersebut. Menurut Sun,dkk. (2010) ada hubungan signifikan antara pengungkapan lingkungan perusahaan dengan manajemen laba. Kemudian Sun,dkk (2010) juga menemukan bahwa hanya variabel jumlah rapat komite audit yang berpengaruh terhadap hubungan pengungkapan lingkungan perusahaan dan manajemen laba.

Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sun,dkk (2010), antara lain adalah tidak digunakannya variabel ukuran dewan direksi (*board size*) sebagai pengukuran (*proxy*) dari praktik tata kelola perusahaan yang baik karena disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, di mana perusahaan-perusahaan di Indonesia menerapkan sistem dua tingkat atau *two tier board system*. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini variabel ukuran dewan direksi (*board size*) diganti dengan variabel dewan komisaris dengan menggunakan *proxy* yaitu proporsi dewan komisaris independen dan rapat dewan komisaris. Selain itu perbedaan penelitian ini adalah penggantian praktik tata kelola perusahaan yang baik dari variabel moderating menjadi variabel independen. Serta menambahkan variabel ukuran komite audit dalam praktik tata kelola perusahaan yang baik.

Penelitian ini dilakukan karena adanya ketidakkonsistenan hasil yang terjadi pada penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Said,dkk. (2009), Prior,dkk. (2008) serta Sun,dkk. (2010). Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan industri sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

(BEI) dalam periode 2010-2011. Penggunaan perusahaan industri sektor pertambangan sebagai sampel dalam penelitian ini karena perusahaan industri sektor pertambangan dalam melakukan aktivitasnya menggunakan sumber daya yang berasal dari lingkungan sekitar, sehingga perusahaan tersebut memberikan dampak yang besar baik secara langsung maupun tidak langsung bagi lingkungan.

1.2 Rumusan Masalah

Pengungkapan lingkungan perusahaan atau *Corporate environmental disclosure (CED)* merupakan suatu bentuk tanggung jawab yang dilakukan perusahaan di dalam memperbaiki kerusakan-kerusakan lingkungan yang terjadi sebagai akibat dari aktivitas operasional yang telah dilakukan oleh perusahaan. Semakin banyaknya bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan perusahaan terhadap lingkungannya, maka *image* perusahaan menurut pandangan masyarakat menjadi meningkat atau citra perusahaan menjadi baik.

Tata kelola perusahaan yang baik berperan penting terhadap keberhasilan perusahaan. Dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik diharapkan mampu mengurangi asimetri informasi serta meningkatkan kinerja manajemen perusahaan.

Pada tanggal 20 Juli 2007 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur kewajiban perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Dengan berlakunya UU PT ini diharapkan dapat meningkatkan luas pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan yang dilakukan perusahaan

karena pengungkapan sosial dan lingkungan yang semula bersifat *voluntary* menjadi bersifat *mandatory* bagi perusahaan.

Atas dasar uraian tersebut permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut

1. Apakah proporsi dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan?
2. Apakah jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan?
3. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan?
4. Apakah jumlah rapat komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian, maka tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

- 1 Untuk mengetahui pengaruh proporsi dewan komisaris terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan.
- 2 Untuk mengetahui pengaruh jumlah rapat dewan komisaris terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan.
- 3 Untuk mengetahui pengaruh ukuran komite audit terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan.
- 4 Untuk mengetahui pengaruh jumlah rapat komite audit terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi akademis, memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi terutama bagaimana tata kelola perusahaan yang baik mempengaruhi pengambilan keputusan perusahaan untuk pengungkapan lingkungan perusahaan dalam laporan tahunnya.
2. Bagi praktisi bisnis, memberikan pemahaman tentang pentingnya pengungkapan lingkungan perusahaan sehingga dapat menjadi masukan dalam pengambilan keputusan.
3. Sebagai bahan referensi atau acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri atas landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta pengembangan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini terdiri atas variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri atas deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri atas simpulan, implikasi, keterbatasan dari penelitian ini dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori Agensi merupakan teori yang mengungkapkan suatu kontrak antara *principal* dengan *agent*. Menurut Darmawati,dkk. (2005), inti dari hubungan keagenan adalah adanya pemisahan antara kepemilikan (*principal/investor*) dan pengendalian (*agent/manajer*). Kepemilikan diwakili oleh investor yang mendelegasikan kewenangan kepada agen dalam hal ini manajer untuk mengelola kekayaan investor. Investor mempunyai harapan bahwa dengan mendelegasikan wewenang pengelolaan tersebut, mereka akan memperoleh keuntungan dengan bertambahnya kekayaan dan kemakmuran investor. Setyapurnama dan Norpratiwi (2004) menyatakan hubungan keagenan dapat menimbulkan masalah pada saat pihak-pihak yang bersangkutan mempunyai tujuan yang berbeda. Pemilik modal menghendaki bertambahnya kekayaan dan kemakmuran para pemilik modal, sedangkan manajer juga menginginkan bertambahnya kesejahteraan bagi para manajer. Inti dari teori agensi adalah pemisahan fungsi antara kepemilikan perusahaan oleh investot dan pengendali perusahaan oleh manajemen.

Adanya asimetri informasi antara manajemen dengan pemilik memberikan kesempatan kepada manajer untuk bertindak oportunistis guna memaksimalkan keuntungan pribadi (Ujiyantho dan Pramuka, 2007). Tindakan oportunistik manajemen, seperti manajemen laba merupakan permasalahan keagenan yang

dapat menyesatkan *stakeholder* khususnya investor mengenai nilai pasar perusahaan dan posisi keuangan sehingga memungkinkan investor membuat keputusan yang salah. Oleh karena itu, manajemen laba dipandang sebagai suatu *agency cost* (Zahra *et al.* , 2005; Xie *et al.*, 2003). *Agency cost* (biaya keagenan) merupakan biaya yang dikeluarkan oleh *principal* untuk biaya pengawasan terhadap agen, pengeluaran yang mengikat oleh agen, dan adanya *residual loss*. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan biaya keagenan (*agency cost*) ke dalam tiga jenis, yaitu:

1. *The monitoring expenditure by the principal.*

Biaya ini merupakan biaya pengawasan yang harus dikeluarkan oleh prinsipal untuk mengawasi perilaku agen.

2. *The bonding cost.*

Biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk menjamin bahwa agen tidak akan melakukan tindakan yang merugikan prinsipal.

3. *The residual loss.*

Biaya ini merupakan pengorbanan nilai uang yang ekuivalen karena penurunan kemakmuran yang dialami oleh prinsipal akibat perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen.

Berdasarkan teori agensi, perusahaan yang menghadapi biaya pengawasan dan biaya kontrak yang rendah cenderung akan melaporkan laba bersih rendah atau dengan kata lain akan mengeluarkan biaya-biaya untuk kepentingan manajemen salah satunya adalah biaya yang dapat meningkatkan reputasi perusahaan di mata masyarakat. Kemudian sebagai wujud pertanggungjawaban,

manajer sebagai agen akan berusaha memenuhi seluruh keinginan pihak prinsipal, salah satunya dengan melakukan *corporate environmental disclosure* sebagai tindakan CSR. Sun,dkk.,(2010) menyatakan bahwa *corporate environmental disclosure* merupakan sinyal yang dapat mengalihkan perhatian pemegang saham dari pengawasan manipulasi laba atau isu-isu lainnya dan sebagai hasilnya harga saham di pasar modal akan meningkat seiring meningkatnya kepercayaan pemegang saham terhadap transparansi informasi yang diungkapkan oleh perusahaan.

Tata kelola perusahaan yang baik *atau Good Corporate Governance (GCG)* sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan sehingga diharapkan dapat memberikan kepercayaan terhadap manajemen dalam mengelola kekayaan pemilik (pemegang saham), selain itu Tata kelola perusahaan yang baik dapat meminimalkan konflik kepentingan dan meminimumkan biaya keagenan (Waryanto, 2010). Oleh karena itu, dibutuhkan sistem Tata kelola perusahaan yang baik di dalam suatu perusahaan.

2.1.2 Teori Legitimasi (Legitimacy Theory)

Teori legitimasi dilandasi oleh adanya suatu kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat, dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi (Ghozali dan Chariri, 2007). Teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi secara berkelanjutan mencari cara untuk menjamin operasi mereka berada dalam batas dan norma yang berlaku di masyarakat (Deegan, 2004). Menurut Deegan (2004), dalam perspektif teori legitimasi, suatu perusahaan akan secara sukarela melaporkan aktifitasnya jika manajemen

menganggap bahwa hal ini adalah yang diharapkan komunitas. Teori legitimasi bergantung pada premis bahwa terdapat 'kontrak sosial' antara perusahaan dengan masyarakat di mana perusahaan tersebut beroperasi. Kontrak sosial adalah suatu cara untuk menjelaskan sejumlah besar harapan masyarakat tentang bagaimana seharusnya organisasi melaksanakan operasinya. Deegan (2000) dalam Ghozali dan Chariri (2007) menyatakan bahwa bentuk eksplisit dari kontrak sosial adalah persyaratan legal, sementara bentuk implisitnya adalah harapan masyarakat yang tidak tercantum dalam peraturan legal. Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat.

Teori legitimasi menjelaskan bahwa sebuah organisasi dalam melakukan kegiatan operasionalnya harus menunjukkan perilaku yang konsisten dengan nilai sosial (Guthrie dan Parker, 1989). Pengungkapan aktivitas CSR dianggap sebagai salah satu hal yang penting untuk mempengaruhi persepsi masyarakat akan kegiatan operasional perusahaan. Hal ini sejalan dengan (Ghozali dan Chariri, 2007) yang menyatakan bahwa perusahaan cenderung menggunakan kinerja berbasis sosial dan lingkungan serta pengungkapan informasi sosial dan lingkungan untuk membenarkan atau melegitimasi aktivitas perusahaan di mata masyarakat. Namun demikian, Gray (1995) dalam Sun,dkk.,(2010) mengemukakan motivasi tersendiri dari manajer dalam melakukan pengungkapan sosial dan lingkungan. Sejumlah studi terdahulu melakukan penilaian atas pengungkapan lingkungan sukarela laporan tahunan dan memandang pelaporan

informasi lingkungan dan sosial sebagai metode yang digunakan organisasi untuk merespon tekanan publik (Guthrie dan Richerri, 2006).

Teori legitimasi menempatkan persepsi dan pengakuan publik sebagai dorongan utama dalam melakukan pengungkapan suatu informasi di dalam laporan keuangan. Teori legitimasi menjelaskan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial dilakukan perusahaan dalam upaya untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat sekitar dan selanjutnya akan mengamankan perusahaan dari hal-hal yang dapat merugikan perusahaan. Lebih jauh lagi, legitimasi ini akan mampu meningkatkan reputasi perusahaan di mata masyarakat, sehingga dengan reputasi yang baik maka akan berpengaruh pada nilai perusahaan tersebut. (Harsanti, 2011).

2.1.3 Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility sering disebut sebagai bagian dari tiga kunci keberhasilan suatu perusahaan yang terdiri dari keberhasilan lingkungan, lingkungan dan finansial. Banyak peneliti maupun lembaga yang mendefinisikan CSR, menurut *the world bussiness Council for Subtainable Development* (WBCSD) definisi dari CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah sebagai :

“kelanjutan oleh suatu entitas bisnis untuk bertindak secara etis dan berperan untuk pembangunan ekonomi dengan meningkatkan kualitas hidup di tempat kerja dan terhadap keluarga mereka seperti halnya masyarakat sekitar dan masyarakat yang lebih luas”

Sedangkan dalam draft ISO 26000, 2007, *Guidance on Social Responsibility*, dalam Waryanto 2009, CSR didefinisikan sebagai suatu tanggung jawab dari perusahaan untuk dampak dari keputusan-keputusan dan aktivitas yang dilakukan

oleh perusahaan tersebut, baik aktivitas di masyarakat maupun lingkungan melalui transparansi dan perilaku etis yang konsisten dengan perkembangan berkelanjutan dan kesejahteraan dari masyarakat, pertimbangan harapan stakeholder, sesuai dengan ketentuan hukum yang bisa diterapkan dari norma-norma internasional yang konsisten dari perilaku dan terintegrasi sepanjang organisasi.

Konsep pelaporan CSR menurut General Reporting Initiative adalah konsep sustainability report yang muncul akibat adanya konsep sustainability development dengan menggunakan metode triple bottom line, yang tidak hanya melaporkan sesuatu yang diukur dari sudut pandang ekonomi saja, melainkan sudut pandang ekonomi, sosial dan lingkungan. GRI Guidelines versi 3 menyebutkan bahwa perusahaan melaporkan dampak aktivitas perusahaan terhadap ekonomi, sosial dan lingkungan pada bagian disclosure. Dari ketiga dimensi tersebut diperluas menjadi 6 dimensi, yaitu: ekonomi, lingkungan, praktek tenaga kerja, hak asasi manusia, masyarakat dan tanggung jawab produk. Keenam dimensi tersebut dapat diketahui melalui item-item, total keseluruhan item untuk 6 dimensi menurut GRI adalah 79 item pengungkapan.

Di Indonesia, pelaporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan telah diwajibkan dalam undang-undang no. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, pada pasal 66 ayat 2, mewajibkan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan sumber daya alam atau yang memiliki aktivitas yang terkait dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan atas biayanya sendiri. Namun seringkali di

dalam laporan tahunan perusahaan kurang mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan secara optimal yang sebenarnya dibutuhkan publik sehingga perlu diatur lebih tegas didalam suatu peraturan. Dengan adanya peraturan Bapepam yang mengatur tentang pengungkapan CSR didalam laporan tahunan, maka annual report dianggap sebagai sumber informasi yang tepat untuk melihat informasi CSR yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut.

2.1.4 Corporate Environmental Disclosure (Pengungkapan Lingkungan Perusahaan)

Pengungkapan secara umum terbagi atas dua jenis yaitu, *voluntary disclosure* dan *mandatory disclosure*. *Voluntary disclosure* adalah pengungkapan berbagai informasi yang berkaitan dengan aktivitas/keadaan perusahaan secara sukarela. Meski pada kenyataannya pengungkapan secara sukarela tidak benarbenar terjadi karena terdapat kecenderungan bagi perusahaan untuk menyimpan dengan sengaja informasi yang sifatnya dapat menurunkan arus kas. Hal tersebut dianggap dapat menyebabkan kerugian pada perusahaan. Oleh karena itu, manajer suatu perusahaan hanya akan mengungkapkan informasi yang baik (*good news*) yang dapat menguntungkan perusahaan. Jenis pengungkapan yang lain adalah *mandatory disclosure*.

Mandatory disclosure adalah pengungkapan informasi berkaitan dengan aktivitas/keadaan perusahaan yang bersifat wajib dan dinyatakan dalam peraturan hukum. Berbeda dengan pelaporan yang bersifat *voluntary*, pelaporan jenis *mandatory* akan mendapat sorotan dan kontrol dari lembaga yang berwenang. Terdapat standar yang menjamin kesamaan bentuk secara relatif dalam praktik

pelaporan dan juga terdapat persyaratan minimum yang harus dipenuhi. *Mandatory disclosure* juga dapat menjadi jembatan atas asimetri informasi antara investor dengan manajer perusahaan atas kebutuhan informasi.

Laporan yang berkaitan dengan informasi yang bersifat non keuangan seperti CSR telah diatur dalam undang-undang dan bersifat *mandatory* melalui Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Meskipun terdapat beberapa hal yang mendukung namun berkaitan dengan aspek lingkungan, belum terdapat suatu peraturan yang benar-benar mengatur tentang pengungkapannya.

Menurut Darwin (2006) dalam Hermawati (2009), kini telah banyak perusahaan yang mengungkapkan kinerja lingkungan dan tanggung jawab sosialnya melalui laporan tahunan atau laporan terpisah yang disebut *sustainability report* (laporan keberlanjutan) dan media lainnya seperti website. Sustainability report ini mencakup aspek kinerja lingkungan, sosial dan ekonomi, dan sering dibuat dengan nama *environmental report*, *social report*, atau *environmental and social report* tergantung dari tujuan pengungkapannya.

Dalam penelitian ini digunakan standar GRI untuk menilai *environmental disclosure*. *Global Reporting Initiative* (GRI) adalah sebuah jaringan berbasis organisasi yang telah mempelopori perkembangan dunia, paling banyak menggunakan kerangka laporan keberlanjutan dan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan dan penerapan di seluruh dunia (www.globalreporting.org). Daftar pengungkapan sosial yang berdasarkan standar GRI juga digunakan oleh Handajani et al. (2010), peneliti ini menggunakan 6

indikator pengungkapan, yaitu: ekonomi, lingkungan, tenaga kerja, hak asasi manusia, sosial dan produk. Berdasarkan bidang lingkungan (environment), indikator yang digunakan untuk penelitian ini hanyalah satu kategori, yaitu indikator kinerja lingkungan.

Corporate environmental disclosure dapat mempengaruhi tuntutan dan ketersediaan atas pelaporan keuangan yang bermutu melalui salah satu dari dua cara, yaitu entrenchment effect dan alignment effect. Entrenchment effect memotivasi perusahaan sebagai penyedia laporan keuangan untuk mengelola laba secara oportunistik. Manajemen mungkin memiliki insentif untuk mengejar keuntungan pribadinya dan mengambil alih kekayaan dari pemegang saham lainnya (Prior et al., 2010). Hal ini dikarenakan kurang efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris.

2.1.6 Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik)

Corporate Governance muncul karena adanya pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian perusahaan, atau yang lebih dikenal dengan masalah keagenan.

Corporate governance merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang diharapkan dapat memberikan dan meningkatkan nilai perusahaan kepada para pemegang saham. (Herawati, 2009 dalam rahnawati 2011). Sedangkan FCGI mendefinisikan *corporate governance* sebagai perangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang kepentingan, pengurus,

pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya.

Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) pada tahun 2006, menyebutkan terdapat lima asas GCG antara lain :

1. *Transparansi (Transparency)*

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. *Akuntabilitas (Accountability)*

Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Akuntabilitas diperlukan agar setiap perusahaan melaksanakan tugasnya secara bertanggungjawab. Untuk itu, setiap penyelenggara perusahaan harus melaksanakan tugasnya secara jujur dan terukur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan publik yang berlaku serta menghindarkan penyalahgunaan wewenang.

3. *Responsibilitas (Responsibility)*

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga

dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Organization for Economic Co-Operation Development (OECD) (2004) menyatakan terdapat lima prinsip *corporate governance* yaitu :

- a. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham (*The rights of shareholders*).
- b. Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham (*The equitable treatment of shareholders*).
- c. Peranan *stakeholders* dalam *corporate governance* (*The role of stakeholders*).
- d. Pengungkapan dan transparansi (*Disclosure and transparency*).
- e. Tanggung jawab direksi dan komisaris (*The responsibilities of the board*).

Corporate governance meliputi dewan komisaris dan komite audit sangat berperan mengendalikan kualitas pelaporan keuangan (Cohen,dkk., 2002). Dalam penelitian ini mekanisme *corporate governance* yang digunakan adalah proporsi

dewan komisaris independen dan jumlah rapat komite audit. Adanya peran dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat diperoleh suatu laporan laba yang berkualitas (Boediono, 2005). Sama halnya dengan peran komite audit yang mempunyai peran penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan, menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *good corporate governance*. Apabila komite audit menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara efektif, maka kontrol terhadap perusahaan akan lebih baik sehingga konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan sendiri dapat diminimalisasi (Andri dan Hanung, 2007 dalam Ningsaptiti, 2010). Secara tidak langsung, praktik *Good Corporate Governance* mampu mengurangi adanya manipulasi informasi perusahaan untuk mencapai keuntungan pribadi.

2.1.6.1 Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah bagian dari organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen (direksi), dan bertanggung jawab untuk menentukan apakah manajemen memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian intern perusahaan (KNKG, 2006). Terdapat dua sistem manajemen yang berbeda yang berasal dari dua sistem hukum yang berbeda (FCGI, 2002) yang membedakan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris, yaitu:

1. Sistem Satu Tingkat atau *One Tier System*

Sistem satu tingkat berasal dari Sistem Hukum Anglo Saxon. Dalam sistem ini perusahaan hanya mempunyai satu dewan direksi yang pada umumnya merupakan kombinasi antara manajer atau pengurus senior (direktur eksekutif) dan direktur independen (non direktur eksekutif) yang bekerja dengan prinsip paruh waktu. Negara-negara yang menggunakan One Tier System misalnya adalah Amerika Serikat dan Inggris.

2. Sistem Dua Tingkat atau *Two Tiers System*

Sistem dua tingkat berasal dari Sistem Hukum Kontinental Eropa. Dalam sistem ini perusahaan mempunyai dua badan terpisah, yaitu dewan pengawas (dewan komisaris) dan dewan manajemen (dewan direksi). Dewan direksi bertugas mengelola dan mewakili perusahaan di bawah pengarahan dan pengawasan dewan komisaris. Dewan direksi juga harus memberikan informasi kepada dewan komisaris dan menjawab hal-hal yang diajukan oleh dewan komisaris. Hal tersebut berarti bahwa dewan komisaris terutama bertanggungjawab untuk mengawasi tugas-tugas manajemen. Negara-negara yang menggunakan *Two Tiers System* adalah Denmark, Jerman, Belanda, Jepang termasuk juga Indonesia.

Tugas-tugas utama Dewan Komisaris meliputi:

1. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha; menetapkan sasaran kerja; mengawasi pelaksanaan dan kinerja

perusahaan; serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan aset;

2. Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota Dewan Direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota Dewan Direksi yang transparan dan adil;
3. Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota Dewan Direksi dan anggota Dewan Komisaris, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan;
4. Memonitor pelaksanaan *Governance*, dan mengadakan perubahan di mana perlu;
5. Memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam perusahaan. (OECD *Principles of Corporate Governance*)

Dewan komisaris terdiri dari komisaris independen dan komisaris nonindependen. Komisaris independen merupakan komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi, sedangkan komisaris non-independen merupakan komisaris yang terafiliasi. Yang dimaksud terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri.

Keberadaan komisaris independen telah diatur Bursa Efek Jakarta (BEJ) melalui peraturan BEJ yang dikutip oleh FCGI (2002). Peraturan tersebut menyiratkan bahwa perusahaan yang terdaftar di Bursa harus mempunyai

komisaris independen yang secara proporsional sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham yang minoritas. Dalam peraturan ini, persyaratan jumlah minimal komisaris independen adalah 30% dari seluruh anggota dewan komisaris.

Kriteria Komisaris Independen :

1. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali.
2. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan dengan direktur dan/atau komisaris lainnya.
3. Komisaris Independen tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan Perusahaan Tercatat yang bersangkutan.
4. Komisaris Independen harus mengerti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
5. Komisaris Independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang bukan merupakan pemegang saham pengendali.

Dengan adanya dewan komisaris independen diharapkan dapat melakukan pengawasan secara efektif karena seorang komisaris independen memiliki integritas yang tinggi. Jumlah Komisaris Independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundangundangan. Salah satu dari Komisaris Independen harus mempunyai latar belakang akuntansi atau keuangan.

2.1.7.2 Komite Audit

Komite Audit adalah suatu komite yang berfungsi memberikan suatu pandangan tentang masalah akuntansi, laporan keuangan dan penjelasannya, sistem pengawasan internal serta auditor independen (*Egon Zehnder International*, dalam FCGI, 2002). Sesuai dengan Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: kep. 29/PM/2004, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan dan pengelolaan perusahaan. Anggota Komite Audit perlu mempunyai suatu pedoman tentang tanggung jawab dan wewenang dalam melaksanakan tugasnya dalam bentuk *Audit Committee Charter*. *Audit Committee Charter* adalah suatu dokumen yang mengatur tentang tugas, tanggung jawab, dan wewenang serta struktur Komite Audit yang dituangkan secara tertulis dan disahkan oleh Dewan Komisaris yang dapat menjamin terciptanya kondisi pengawasan suatu perusahaan dengan baik (FCGI, 2002).

Seperti diatur dalam Kep-29/PM/2004 yang merupakan peraturan yang mewajibkan perusahaan membentuk komite audit, tugas komite audit antara lain :

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal.

4. Melaporkan kepada komisaris berbagai resiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi.
5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada dewan komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten.
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan rahasia perusahaan.

Menurut FCGI (2002), pada umumnya Komite Audit mempunyai tanggung jawab pada tiga bidang, yaitu:

1. Laporan Keuangan (*Financial Reporting*)

Tanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usahanya, serta rencana dan komitmen jangka panjang perusahaan.

2. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Tanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, etika bisnis serta melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.

3. Pengawasan Perusahaan (*Corporate Control*)

Tanggung jawab dalam pemahaman tentang masalah serta hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal.

Lebih lanjut, KNKG (2006) menyatakan bahwa di dalam pedoman GCG di Indonesia dijelaskan bahwa Komite Audit bertugas membantu Dewan

Komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

Komite audit dalam melaksanakan tugasnya harus terdiri dari individu-individu yang mandiri dan tidak terlibat dengan tugas sehari-hari dari manajemen yang mengelola perusahaan, dan memiliki pengalaman untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif. Salah satu dari beberapa alasan utama kemandirian ini adalah untuk memelihara integritas serta pandangan yang objektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh komite audit, karena individu yang mandiri cenderung lebih adil dan tidak memihak serta objektif dalam menangani suatu permasalahan (FCGI, 2002). Dan salah seorang anggota harus memiliki latar belakang serta kemampuan di bidang akuntansi dan atau keuangan (KNKG, 2006).

Sedangkan untuk jumlah anggota Komite Audit harus disesuaikan dengan kompleksitas suatu perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen dan

anggotanya dapat terdiri dari komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Sun,dkk (2010), telah meneliti hubungan antara *Corporate environmental disclosure* dan *earnings management* dan dampak mekanisme *corporate governance* terhadap asosiasi tersebut. Mekanisme *corporate governance* yang digunakan adalah ukuran Dewan Direksi, jumlah rapat Komite Audit dengan variabel kontrol, yaitu ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas dan jenis industri. Menggunakan sampel 245 perusahaan non-keuangan Inggris untuk tahun yang berakhir pada Maret 2007. Sun, dkk (2010) tidak menemukan adanya hubungan yang signifikan antara *Corporate environmental disclosure* dan *earnings management*. Kemudian juga menemukan bahwa jumlah rapat komite audit memiliki hubungan signifikan antara *Corporate environmental disclosure* dan *earnings management*, tetapi tidak untuk ukuran Dewan Direksi.

Prior, D., Surroca, J. and Tribo, J. (2008) meneliti hubungan antara *Corporate Social Responsibility*, *Corporate financial performance* dan *earnings management*. Sampel yang digunakan adalah 593 perusahaan dari 26 negara yang diambil dari *database Sustainable Investment Research International Company* (SIRI) dari tahun 2002 hingga 2004. Variabel yang digunakan adalah manajemen laba dan CFP sebagai variabel independen dan *Social Responsibility* sebagai variabel independen. Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol, yaitu investasi R&D, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan institusional, tingkat risiko

manajerial, ukuran perusahaan, *leverage*, dan sumber daya keuangan. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa kombinasi manajemen laba dan kegiatan *Social Responsibility* adalah kegiatan yang mahal bagi perusahaan dan dibenarkan bahwa praktik manajemen laba memiliki dampak negatif terhadap kinerja keuangan. Prior, dkk (2008) menemukan bahwa hubungan positif secara signifikan antara manajemen laba dengan *corporate social responsibility*.

Said, Zainuddin dan Haron. (2009) melakukan penelitian untuk mengetahui hubungan antara karakteristik *corporate governance* dan *Social Responsibility* pada perusahaan-perusahaan publik yang terdaftar di Malaysia. Dalam penelitiannya Said, dkk. Menggunakan *annual report* dan *website* perusahaan untuk menganalisis pengungkapan *Social Responsibility*. Tema yang dianalisis adalah lingkungan, komunitas, sumber daya manusia, energi, dan produk. Sampel dalam penelitian ini adalah 150 perusahaan yang terdaftar di KLSE pada tahun 2006. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah, dan komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan *Social Responsibility*.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Variabel	Alat Analisis	Hasil
1	Sun <i>et al.</i> (2010)	<ul style="list-style-type: none"> • Independen (X): manajemen laba • Dependen (Y): Corporate Environmental Disclosure. • Moderating: 	Ordinary Least Square (OLS) regression with robust standard errors	Tidak menemukan adanya hubungan signifikan antara CED dan manajemen laba. Kemudian menemukan bahwa jumlah rapat komite audit memiliki

		<p>CG (ukuran dewan direksi, jumlah rapat komite audit)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontrol (X): ukuran perusahaan, <i>leverage</i>, profitabilitas, jenis industri. 		<p>hubungan signifikan antara CED dan manajemen laba. Akan tetapi tidak ditemukan pada ukuran dewan direksi.</p>
2	Prior <i>et al.</i> (2008)	<ul style="list-style-type: none"> • Independen (X): manajemen laba dan CFP • Dependen (Y): CSR • Kontrol (X): investasi R&D, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan institusional, tingkat risiko, ukuran perusahaan, <i>leverage</i>, <i>financial resources</i>. 	Regression with robustness checks	Adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara manajemen laba dengan CSR.
3	Said <i>et al.</i> (2009)	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen: ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, dualitas CEO, komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan luar negeri, dan kepemilikan pemerintah • Variabel dependen : pengungkapan CSR 	Regresi Berganda (multiple Regression)	Kepemilikan pemerintah dan komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan CSR.

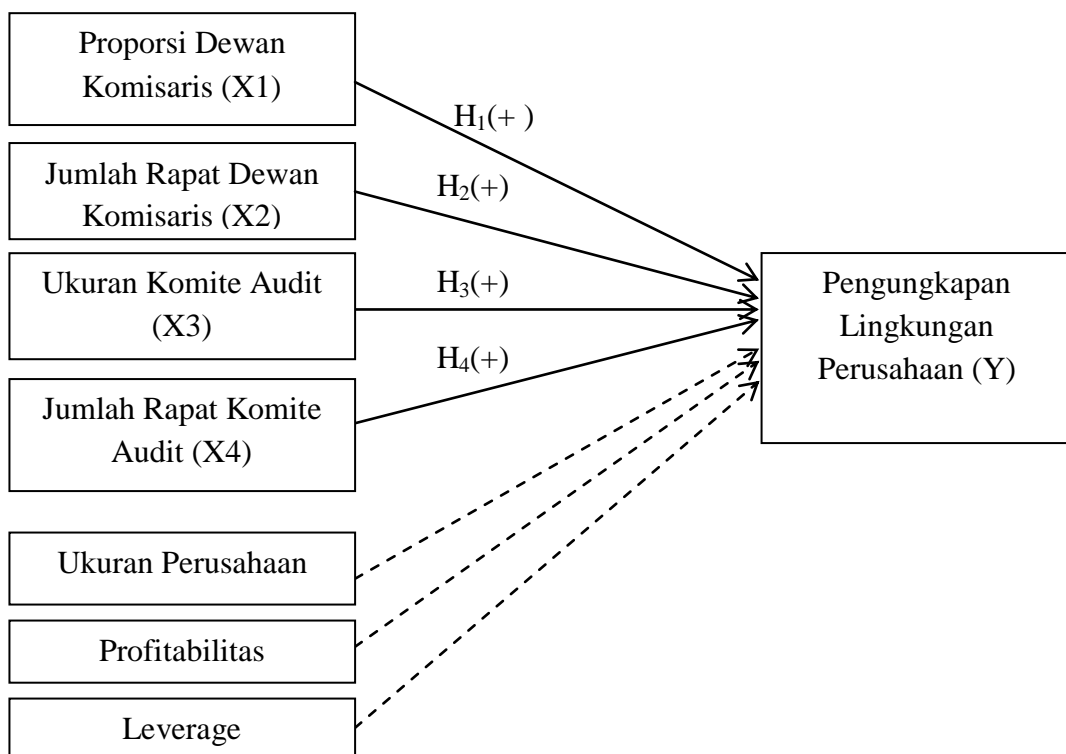
2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini lebih berfokus membahas pada masalah lingkungan yang merupakan bagian dari item pengungkapan CSR. Penelitian ini menggunakan modifikasi antara penelitian yang dilakukan oleh Sun, dkk (2010). Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah proporsi dewan komisaris, jumlah rapat Dewan Komisaris ukuran Komite Audit dan jumlah rapat Komite Audit sebagai variabel independen. Pengungkapan lingkungan perusahaan sebagai variabel dependen serta dalam penelitian menggunakan variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas dan *leverage*.

Berikut ini adalah kerangka pemikiran teoritis berdasarkan model penelitian ini :

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Teoritis



2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Proporsi Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Lingkungan Perusahaan

Komisaris Independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri (KNKG, 2010). Sikap independensi dari pihak luar serta memiliki tujuan untuk kepentingan perusahaan menjadikan keberadaan dewan komisaris independen sangatlah penting bagi kelangsungan perusahaan. Komisaris independen memiliki integritas yang tinggi sehingga lebih efektif dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan selain itu kepentingan mereka tidak terganggu oleh ketergantungan pada organisasi ataupun perusahaan. Keberadaan Komisaris Independen telah diatur Bursa Efek Jakarta melalui peraturan BEJ tanggal 1 Juli 2000 III.1.4. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa persyaratan jumlah minimal Komisaris Independen adalah 30% dari seluruh anggota Dewan Komisaris.

Komisaris Independen diperlukan oleh perusahaan untuk meningkatkan independensi Dewan Komisaris terhadap kepentingan pemegang saham (mayoritas) dan benar-benar menempatkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan lainnya (Muntoro, 2006). Dengan demikian, semakin besar proporsi Komisaris Independen yang dimiliki perusahaan diharapkan kinerja Dewan Komisaris mampu bertindak semakin objektif dan mampu melindungi kepentingan perusahaan dalam hal ini mendorong peningkatan Pengungkapan lingkungan perusahaan.

H1: Proporsi Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Pengungkapan lingkungan perusahaan.

2.4.2 Jumlah Rapat Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Lingkungan Perusahaan

Di Indonesia, menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Bab VII Pasal 108 dinyatakan bahwa Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Dewan Komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Menurut Egon Zehnder (dalam booklet FCGI 2002), Dewan Komisaris - merupakan inti dari *Corporate Governance* - yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas.

Untuk mendukung terlaksananya tugas dewan komisaris secara maksimal, dewan komisaris perlu mengadakan pertemuan atau rapat yang disebut dengan rapat dewan komisaris. Rapat dewan komisaris merupakan suatu proses yang dilakukan oleh dewan komisaris dalam pengambilan keputusan bersama tentang kebijakan perusahaan yang akan dijalankan. Hal ini berarti semakin sering frekuensi Dewan Komisaris mengadakan rapat maka fungsi pengawasan terhadap manajemen semakin efektif. Dengan demikian, diharapkan dengan semakin

efektiknya fungsi pengawasan, maka pengungkapan lingkungan perusahaan oleh perusahaan akan semakin luas.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2 : Jumlah rapat Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan.

2.4.3 Ukuran Komite Audit Komisaris terhadap Pengungkapan Lingkungan Perusahaan

Komite audit merupakan komponen baru dalam sistem pengendalian perusahaan yang dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian. FCGI (2002) menyatakan bahwa komite audit harus terdiri dari individu-individu yang mandiri dan tidak terlibat dengan manajemen dalam melakukan tugas operasional perusahaan, dan harus memiliki pengalaman dalam melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif. Hal ini dikarenakan untuk menjaga integritas serta pandangan yang objektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh Komite Audit, karena individu yang mandiri cenderung lebih adil dan tidak memihak serta obyektif dalam menangani suatu permasalahan. Jumlah komite audit sangat penting bagi pengawasan dan pengendalian perusahaan sehingga dengan adanya komite audit pada suatu perusahaan maka akan menambah efektifitas pengawasan termasuk praktik dan *Corporate Environmental Disclosure*. Ukuran komite audit yang lebih besar

diharapkan dapat menjaga kinerja dengan lebih baik. Penelitian oleh Handajani dkk (2008); Bliss dan Balachandran (2003), dalam Said dkk (2009), menemukan adanya hubungan positif antara komite audit dengan pengungkapan lingkungan perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3 : Ukuran Komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan.

2.4.4 Jumlah Rapat Komite Audit Komisaris terhadap Pengungkapan Lingkungan Perusahaan.

Komite audit merupakan salah satu komite penunjang dewan komisaris. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas komite audit adalah pertemuan formal dan informal. Pertemuan formal dilaksanakan untuk mengevaluasi kualitas laporan keuangan dan perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan. Frekuensi dan isi pertemuan komite audit tergantung pada tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Jumlah pertemuan komite audit dapat ditentukan berdasarkan ukuran perusahaan dan besarnya tugas yang dibebankan kepada komite audit. Berdasarkan keputusan ketua Bapepam Nomor Kep-24/PM/2004 dalam peraturan Nomor IX.I.5 disebutkan bahwa komite audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat dewan komisaris yang ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan. Selain melakukan pertemuan formal, komite audit juga melakukan pertemuan informal, misalnya melakukan komunikasi dengan manajemen, akuntan publik dan auditor internal. Komite audit

biasanya membuat agenda rapat dengan menerima masukan dari manajemen, auditor internal dan auditor eksternal. Dengan demikian, semakin banyak jumlah pertemuan audit diharapkan akan semakin membuat informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan lebih reliable.

Dalam penelitian Waryanto, (2010) menemukan jumlah rapat komite audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan. Hal tersebut berarti bahwa semakin rutin komite audit mengadakan pertemuan maka semakin kecil potensi manajer untuk tidak melakukan pengungkapan CSR pada perusahaannya untuk mengelabui *stakeholder*.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H4 : Jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Bagian ini akan membahas tentang pengertian dan jenis variabel dependen, variabel independen, dan variabel kontrol. Variabel dependen dalam penelitian ini menggunakan pengungkapan lingkungan perusahaan sedangkan praktik tata kelola perusahaan yang baik sebagai variabel independen, dan dalam penelitian ini menggunakan variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas dan leverage.

Tabel 3.1

Definisi Operasional Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Pengungkapan lingkungan perusahaan (Y)	Global Reporting Initiative (GRI)	Jumlah item yang diungkapkan perusahaan dibagi total item	Skala Rasio
Proporsi Dewan Komisaris (X1)	Corporate Governance Perception Index (CGPI)	Presentase Komisaris Independen	Skala Rasio
Jumlah Rapat Dewan	Corporate Governance	Jumlah rapat Dewan Komisaris dalam 1 tahun	Skala Interval

Komisaris (X2)	Perception Index (CGPI)		
Ukuran Komite Audit (X3)	Corporate Governance Perception Index (CGPI)	Jumlah anggota Komite Audit dalam perusahaan	Skala Interval
Jumlah Rapat Komite Audit (X4)	Corporate Governance Perception Index (CGPI)	Jumlah rapat komite audit dalam 1 tahun	Skala Interval
Ukuran Perusahaan	Laporan posisi keuangan	Total Aset	Skala Nominal
Profitabilitas	Laporan laba rugi	$\frac{\text{Pendapatan Sebelum pajak}}{\text{Total Aset}}$	Skala Rasio
Leverage	Laporan posisi keuangan	$\frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Ekuitas}}$	Skala Rasio

3.1.1 Variabel Terikat (Dependen)

Variabel dependen merupakan variabel terikat dan dipengaruhi oleh variabel lainnya (Ghozali, 2009). Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah pengungkapan lingkungan perusahaan. Pengungkapan informasi lingkungan perusahaan dalam laporan tahunan ini sebagai salah satu cara perusahaan untuk membangun dan/atau mempertahankan kontribusi perusahaan tersebut. Selain itu juga dapat digunakan untuk mengukur sejauh

mana perusahaan memberikan manfaat positif maupun negatif terhadap lingkungan sekitarnya.

Pengukuran pengungkapan lingkungan perusahaan dalam penelitian ini menggunakan indeks *Global Reporting Initiative* (GRI). Penilaian menggunakan indeks GRI ini telah dilakukan di berbagai negara. Jumlah item CSR pengungkapan menurut GRI adalah 79 item yang terdiri dari:

1. Ekonomi (9 item)
2. Lingkungan (30 item)
3. Praktik tenaga kerja (14 item)
4. Hak manusia (9 item)
5. Masyarakat (8 item)
6. Tanggung jawab produk (9 item).

Untuk penelitian ini indikator yang digunakan hanyalah indikator kinerja lingkungan (30 item). Kinerja lingkungan mencakup kinerja yang berkaitan dengan 6 aspek, yaitu material, energi, air, biodiversitas (keanekaragaman hayati), emisi efluen limbah, produk jasa, pengangkutan/transportasi dan aspek menyeluruh. Penghitungan CSR dilakukan dengan menggunakan variabel dummy yaitu :

Nilai 0 : Jika perusahaan tidak mengungkapkan item pada daftar pertanyaan.

Nilai 1 : Jika perusahaan mengungkapkan item pada daftar pertanyaan.

Pengukuran pengungkapan lingkungan perusahaan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{CED} = \frac{\text{Jumlah item yang diungkapkan Perusahaan}}{\text{Jumlah Item pengungkapan lingkungan GRI}}$$

3.1.2 Variabel Bebas (Independen)

Variabel independen merupakan variabel bebas yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah praktik tata kelola perusahaan yang baik.

Praktik tata kelola perusahaan yang baik dalam penelitian ini diproksikan dengan proporsi dewan komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, jumlah rapat dewan direksi, ukuran komite audit, dan jumlah rapat komite audit.

3.1.2.1 Proporsi Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (KNKG, 2006).

$$\text{Proporsi Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah anggota komisaris independen}}{\text{Jumlah seluruh anggota komisaris}}$$

3.1.2.2 Jumlah Rapat Dewan Komisaris

Jumlah Rapat Dewan Komisaris merupakan jumlah rapat atau pertemuan yang dilakukan oleh anggota dewan komisaris dalam waktu satu tahun. Rapat dewan komisaris merupakan suatu proses yang dilakukan oleh dewan komisaris

dalam pengambilan suatu keputusan mengenai kebijakan perusahaan. (said, dkk.,2009)

3.1.2.3 Ukuran Komite Audit

Ukuran Komite Audit merupakan jumlah anggota komite audit dalam perusahaan. Ukuran Komite Audit diukur dengan menghitung jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan berdasarkan jumlah keseluruhan anggota komite audit baik yang berasal dari internal perusahaan maupun anggota komite audit independen. Jumlah komite audit dapat tercantum dalam laporan tahunan perusahaan. (Sun, dkk.,2010).

3.1.2.4 Jumlah Rapat Komite Audit

Jumlah rapat komite audit merupakan jumlah pertemuan atau rapat yang dilakukan oleh komite audit perusahaan dalam waktu satu tahun. Jumlah rapat komite audit dapat dilihat pada laporan tahunan perusahaan yang tercantum pada bagian laporan tata kelola perusahaan. (Sun, dkk.,2010).

3.1.3 Variabel Kontrol

Variabel kontrol adalah variabel yang berfungsi untuk mengendalikan sehingga pengaruh variabel bebas terhadap terikat tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, profitabilitas dan *leverage*.

3.1.3.1 Ukuran Perusahaan (Size)

Ukuran perusahaan diukur berdasarkan total aset yang dimiliki oleh perusahaan sampel. Total aset perusahaan dapat dilihat di dalam laporan tahunan perusahaan. (Sun, dkk.,2010).

3.1.3.2 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atau profit dalam upaya meningkatkan nilai pemegang saham. Dalam penelitian ini profitabilitas perusahaan diukur dengan *Return on Asset* (ROA). ROA merupakan ukuran efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. (Sun, dkk.,2010). ROA dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{ROA} = \frac{\text{laba sebelum pajak (EBIT)}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

3.1.3.3 Leverage

Rasio *leverage* menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar semua kewajiban jangka panjang maupun jangka pendek. Rasio *leverage* yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan banyak dibiayai oleh investor atau kreditur luar. Semakin tinggi rasio *leverage* berarti semakin besar pula proporsi pendanaan perusahaan yang dibiayai dari hutang (Waryanto.,2010). Rasio *leverage* dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010 - 2011, pemilihan perusahaan pertambangan karena perusahaan-perusahaan pertambangan lebih banyak mempunyai pengaruh/dampak terhadap lingkungan sekitarnya akibat dari aktivitas operasi yang dilakukan oleh perusahaan. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel sesuai dengan kriteria tertentu.

Kriteria-kriteria yang digunakan dalam penelitian sampel adalah:

1. Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI selama tahun 2010 - 2011.
2. Perusahaan tersebut menerbitkan *annual report* maupun *sustainability report* periode 2010 - 2011.
3. Memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data kuantitatif berupa laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan pertambangan tahun 2010-2011 yang diperoleh dari <http://www.idx.co.id/>. Sumber data yang digunakan merupakan publikasi laporan tahunan dan laporan keberlanjutan masing-masing perusahaan pertambangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia yang diperoleh di Pojok BEI Universitas Diponegoro, situs resmi BEI (<http://www.idx.co.id/>) dan situs web resmi masing-masing perusahaan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri laporan tahunan yang terpilih menjadi sampel. Sebagai panduan, digunakan instrumen penelitian *Global Reporting Initiative* (GRI) berupa *check list* atau daftar pertanyaan-pertanyaan yang berisi item-item pengungkapan informasi lingkungan perusahaan.

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan variabel-variabel dalam penelitian ini. Alat analisis yang digunakan adalah rata-rata, maksimal, minimal, dan standar deviasi untuk mendeskripsikan masing-masing variabel penelitian.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi berganda, dalam penelitian ini digunakan uji asumsi klasik untuk menguji apakah data memenuhi asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik dilakukan dengan cara sebagai berikut:

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu (*residual*) memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2006). Alat uji yang digunakan adalah dengan analisis jarque-bera. Uji ini mengukur perbedaan kemiringan (*skewness*) dan kurtosis data. Statistik Jarque-bera mengikuti distribusi Chi-kuadrat dengan derajat kebebasan dua.

3.5.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas (Ghozali, 2006). Menurut Gujarati (2006) Mendeteksi multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat korelasi antar variabel bebas (*Correlation Matrix*). Suatu data dapat dikatakan bebas dari multikolinieritas jika nilai *correlation* antar variabel independen lebih kecil dari 0,8 (*correlation* < 0,8).

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi tidak terjadi kesamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2009). Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini untuk mendeteksi apakah terdapat heteroskedastisitas pada model regresi berganda, menggunakan *white's heteroscedasticity test* atau lebih dikenal dengan uji white. Hipotesis dalam pengujian ini adalah:

H₀ : Tidak ada heteroskedastisitas

H₁ : ada heteroskedastisitas

Apabila nilai probabilitas dari Obs*R² lebih kecil dari tingkat $\hat{\alpha} = 5\%$ maka H₀ ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi mengandung heteroskedastisitas. Dan sebaliknya, Apabila nilai probabilitas dari Obs*R² lebih besar dari tingkat $\hat{\alpha} = 5\%$ maka H₀ diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa

model regresi mengandung tidak heteroskedastisitas atau model regresi sudah homoskedastis. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier berganda ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem autokorelasi (Ghozali, 2006). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.

Menurut Gujarati (2006) untuk menguji ada tidaknya autokorelasi menggunakan *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test*. Hipotesis uji ini adalah :

- a. Jika nilai $Obs * R\text{-squared} > X^2$ tabel, maka tidak lolos uji autokorelasi
- b. Jika nilai $Obs * R\text{-squared} < X^2$ tabel, maka lolos uji autokorelasi

3.5.3 Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda ini dipakai karena untuk menguji pengaruh beberapa variabel bebas (metrik) terhadap satu variabel terikat (metrik) dengan *software* Eviews. Dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Dalam penelitian ini, model regresi berganda yang akan diuji adalah sebagai berikut :

$$CEDit = \alpha_0 + \alpha_1 INKOMit + \alpha_2 RAKOMit + \alpha_3 KOMAUDit + \alpha_4 RADITit + \alpha_7 SIZEit + \alpha_6 ROAit + \alpha_7 LEVit + e$$

Dimana:

$CEDit$ = *Corporate environmental disclosure* (pengungkapan lingkungan perusahaan)

α_0 = Konstanta

α_1 - α_6 = Koefisien

$INKOMit$ = Proporsi Dewan Komisaris

$RAKOMit$ = Jumlah Rapat Dewan Komisaris

$KOMAUDit$ = Ukuran (jumlah) Komite Audit

$RADITit$ = Jumlah Rapat Komite Audit

$SIZEit$ = Ukuran Perusahaan diproksikan dengan *Total Aset*

$ROAit$ = Profitabilitas diproksi dengan *Return On Assets*

$LEVit$ = Rasio *Leverage* diproksi dengan *Debt to Equity Ratio*

e = *Error*

3.5.3.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) ini digunakan untuk menggambarkan kemampuan model menjelaskan variasi yang terjadi dalam variabel dependen (Ghozali, 2009). Koefisien determinasi (R^2) dinyatakan dalam persentase. Nilai koefisien korelasi (R^2) ini berkisar antara $0 < R^2 < 1$. Dari sini diketahui seberapa besar variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabel independennya, sedangkan sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model.

3.5.3.2 Uji Pengaruh Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dengan tingkat signifikansi (5%), maka kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

1. Bila nilai signifikansi $f < 0.05$, maka H_0 ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara semua variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Apabila nilai signifikansi $f > 0.05$, maka H_0 diterima, artinya semua variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.5.3.3 Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Dengan tingkat signifikansi (5%), maka kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

1. Apabila nilai signifikansi $t < 0.05$, maka H_0 ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Apabila nilai signifikansi $t > 0.05$, maka H_0 diterima, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.